

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan audit dalam bidang pemerintahan dikenal dengan sebutan audit sektor publik. Audit sektor publik merupakan pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban atas pengelolaan dana masyarakat yang bertujuan untuk membandingkan hasil pencapaian program, fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pelaksanaan audit sektor publik adalah untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Dewasa ini persaingan antar perusahaan semakin meningkat diiringi dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia. Dalam menghadapi masalah itu para pengelola perusahaan membutuhkan jasa akuntan, jasa akuntan publik bagi para perusahaan swasta dan jika pada perusahaan milik negara, Badan Pemeriksaan Keuangan yang berkewajiban melakukan pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan Negara itu sendiri. Para akuntan dalam hal ini adalah auditor yaitu suatu profesi yang salah satu tugasnya melaksanakan audit terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan dan memberikan opini atau pendapat terhadap saldo akun dalam laporan keuangan apakah telah disajikan secara wajar sesuai SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum).

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga atau badan yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan Negara. Pada tingkatan tertinggi terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemudian terdapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebagian tugas-tugas BPKP tidak berbeda dengan tugas kantor akuntan publik. Sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai badan pemerintah telah diaudit oleh BPKP.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri serta dipercaya untuk dapat mewujudkan good corporate dan good governance dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. Dalam Rencana Strategis BPK, memiliki tujuan (goals) yaitu mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional, memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, mewujudkan BPK sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, dan mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Auditor pemerintah adalah audit professional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan instansi pajak. Auditor BPK itu sendiri menyajikan laporan pengauditan yang merupakan pihak internal suatu lembaga pemerintahan kemudian oleh pihak BPKP tersebut laporan yang telah diaudit diberikan kepada BPK yang merupakan lembaga eksternal pemerintah kemudian dipublish oleh pihak BPK itu sendiri menjadi laporan audit yang boleh dilihat oleh pihak umum.

Seorang auditor dalam melakukan tugasnya membuat pertimbangan audit dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Aspek-aspek individual merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu dalam melakukan pertimbangan audit. Pertimbangan yang dibuat oleh seorang auditor dipengaruhi oleh cara pandang (persepsi) auditor dalam menanggapi informasi. Persepsi auditor dalam menanggapi dan mengevaluasi informasi dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain faktor pengalaman auditor, kompleksitas tugas dalam melakukan pemeriksaan dan preferensi klien.

Dalam melaksanakan tugas audit, auditor harus mengevaluasi berbagai alternatif informasi dalam jumlah yang relatif banyak untuk memenuhi standar

pekerjaan lapangan, yaitu bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Dalam literatur psikologi dan auditing menunjukkan bahwa efek dilusi dalam auditing bisa berkurang oleh auditor yang berpengalaman karena struktur pengetahuan yang baik dari auditor yang berpengalaman menyebabkan mereka mengabaikan informasi yang tidak relevan. Dengan kata lain kompleksitas tugas yang dihadapi sebelumnya oleh seorang auditor akan menambah pengalaman serta pengetahuannya.

Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam tugasnya. Oleh karena itu pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, sehingga pengalaman dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh ijin menjadi akuntan publik (SK Menkeu No. 43/ KMK.017/ 1997).

Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan yang cukup. Pelatihan tersebut berupa kegiatan-kegiatan, seperti seminar, simposium, lokakarya pelatihan itu sendiri dan kegiatan penunjang ketrampilan lainnya. Melalui program pelatihan para auditor juga mengalami proses sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang akan ditemui. Dengan demikian maka

kompleksitas tugas yang dihadapi oleh seorang auditor akan menambah pengalaman serta pengetahuannya dalam Yudhi Herliansyah (2006). Auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat kesalahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman.

Dalam literatur auditing, efek preferensi klien terjadi bila klien dengan jelas menyatakan suatu hasil tertentu atau perlakuan akuntansi yang diinginkan dan auditor berperilaku dengan cara konsisten dengan keinginan klien itu. Preferensi klien akan berdampak terhadap pertimbangan auditor hanya bila ada sejumlah kondisi-kondisi tertentu terjadi dalam konteks audit dalam Tri Ramaraya Koroy (2005).

Bila auditor mendapat pernyataan eksplisit mengenai preferensi klien yang bertentangan dengan preferensi auditor atau standar akuntansi sehingga terdapat hubungan yang berlawanan yang terbentuk antara auditor dan klien maka studi-studi yang telah dilakukan melaporkan efek preferensi klien yang kecil atau tidak ada (Gramling, 1999; Buchman *et al.*, 1996; Salterio, 1996) dalam Tri Ramaraya Koroy (2005). Sedangkan bila hubungan berlawanan itu dikurangi dengan memasukkan skenario tidak adanya pedoman otoritatif dalam standar akuntansi, maka hasil studi menunjukkan efek preferensi klien yang lebih kuat. Dengan demikian tingkat ambiguitas menentukan pengaruh preferensi klien terhadap pertimbangan audit.

Dalam memandang pengaruh pengalaman terhadap pertimbangan auditor menghadapi preferensi klien, Haynes *et al.* (1998) dalam Tri Ramaraya Koroy (2005) lebih cenderung mengaitkannya dengan faktor eksternal dari diri

auditor, yaitu insentif kontekstual. Hal yang juga penting dikaitkan dengan hal ini adalah berkaitan dengan karakteristik individual auditor yang berpengalaman itu. Jadi, efek pengalaman dalam hal ini dihubungkan sebagai faktor internal dalam karakteristik diri auditor itu.

Penelitian ini merupakan penyempurnaan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zulaikha, dkk, (2006) yang mengamati tentang pengaruh interaksi gender, kompleksitas tugas dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan audit (audit judgement) dan penelitian yang dilakukan Tri Ramaraya Koroy (2005) , yang mengamati tentang pengaruh preferensi klien dan pengalaman audit terhadap audit judgement. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh signifikan terhadap keakuratan judgement, sedangkan pengalaman sebagai auditor berpengaruh langsung terhadap judgement dan kepentingan klien tidak secara otomatis menjadi konsisten dengan pertimbangan yang diambil oleh auditor.

Atas dasar latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul " **Pengaruh Pengalaman Auditor , Komplexitas Tugas dan Preferensi Klien Terhadap Pertimbangan Audit Pada Auditor BPK dan BPKP di wilayah Sumatera Selatan**" .

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh secara partial antara pengalaman auditor, kompleksitas tugas , dan preferensi klien terhadap pertimbangan audit ?
2. Apakah terdapat pengaruh secara bersamaan atau simultan antara pengalaman auditor, kompleksitas tugas dan preferensi klien terhadap pertimbangan audit ?

C. Hipotesis

H₁: Pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan yang diambil oleh auditor

H₂: Kompleksitas tugas berpengaruh terhadap pertimbangan yang diambil oleh auditor

H₃: Preferensi Klien berpengaruh terhadap pertimbangan yang diambil oleh auditor

H₄: Pengalaman Auditor, Kompleksitas tugas, dan Preferensi Klien secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertimbangan yang diambil oleh auditor

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pengalaman auditor, kompleksitas tugas dan preferensi klien terhadap pertimbangan audit.

E. Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti :

1. Bagi profesi auditor

Membawa dampak yang positif bagi peningkatan profesionalisme auditor serta memberikan masukan dalam melakukan auditnya dan dapat lebih meningkatkan kualitas hasil audit.

2. Bagi Organisasi

Mendorong agar meningkatkan standar profesional bagi para auditor agar menjadi lebih baik lagi dalam mengambil pertimbangan audit, serta memberikan implikasi bagi BPK dan BPKP agar lebih profesional dalam menghadapi klien.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut oleh para peneliti selanjutnya yang tertarik.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, hipotesis penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang beberapa teori atau konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Landasan teori pada penelitian ini berisi tentang teori yang berkaitan dengan pengalaman auditor, kompleksitas tugas, preferensi klien dan pertimbangan audit.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi penelitian, jenis data penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta dijelaskan juga secara terperinci mengenai langkah-langkah peneliti dalam mengumpulkan data dan cara menganalisis data penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian mengenai data penelitian yang berhasil dikumpulkan dan diolah, analisis data penelitian, serta pembahasan hasil penelitian secara terpadu yang dihubungkan dengan landasan teori.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban permasalahan penelitian berdasarkan pada analisis dan pembahasan. Dari hasil yang didapat akan diungkapkan keterbatasan penelitian serta saran yang berguna bagi penelitian sebelumnya.